

PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Leska Lely Oktaviana
leskalely@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the influence of share ownership and corporate social responsibility to the tax aggressiveness. This research has been conducted by using manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2011 until 2015 periods. The sample of this research has been done by using purposive sampling technique and based on predetermined criteria, 225 manufacturing companies have been selected as samples. The analysis method has been carried out by using multiple linear regressions analysis with the application of SPSS (Statistical Product and Service Solutions). The dependent variable of this research has been done by using tax aggressiveness and the independent variables i.e. share ownership consists of managerial ownership, institutional ownership, and public ownership also corporate social responsibility. The result of this research shows that managerial ownership gives significant and negative influence to the tax aggressiveness meanwhile institutional ownership gives significant and positive influence to the tax aggressiveness, public ownership gives significant and positive influence to the tax aggressiveness, and corporate social responsibility gives significant and positive influence to the tax aggressiveness.

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Public Ownership, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 225 perusahaan manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak dan variabel independen yaitu kepemilikan saham yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik serta *corporate social responsibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instusional, Kepemilikan Publik, *Corporate Social Responsibility*, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan suatu negara termasuk Indonesia, hal ini tercermin dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dari Rp 1.822,5 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.546,7 triliun berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan tersebut digunakan untuk pembangunan negara yang secara tidak langsung dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut undang - undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan menggunakan dasar perhitungan penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar atau bahkan menghilangkan biaya pajak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif terhadap pajak. Menurut Frank *et al.* (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan menurunkan beban pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, institusional, dan publik selain itu penelitian ini juga membahas faktor lain yaitu *corporate social responsibility*. Menurut Boussaidi dan Hamed (2015) meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Kemudian menurut Atari (2016) tindakan pajak agresif berkaitan pada besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan (Atiah *et al.*, 2015). Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, pajak merupakan beban yang akan menaikkan laba perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*).

Berikut beberapa hasil penelitian yang membahas hubungan kepemilikan saham dan CSR terhadap agresivitas pajak. Menurut Novitasari (2017) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Atari (2016) dan Rohmansyah (2017) menemukan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun Boussaidi dan Hamed (2015) dan Rahmawati (2016) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase *managerial ownership* yang tinggi akan mengurangi agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dinyatakan tidak berpengaruh oleh Atiah *et al.* (2016) sedangkan Novitasari (2017), Atari (2016) dan Amril *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Rahmawati (2016) dan Ginting (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Puspita (2014) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan publik dengan penghindaran pajak. Kemudian Santoso (2014) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Atiah *et al.* (2015) dan Prayogo (2015) menemukan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Jesica dan Toly (2014) dan Badriah *et al.* (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Meiranto dan Nugraha (2015), Tjondro (2016) dan Purwanggono (2015) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lanis dan

Richardson (2012), Rahmawati (2016), dan Mustika (2017) menunjukkan hasil CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Meiranto dan Nugraha (2015) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *lverage* dan *capital intensity* terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meiranto dan Nugraha (2015) terletak pada variabel, sampel dan tahun penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen kepemilikan saham dan *Corporate Social Responsibility* selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015, sedangkan Meiranto dan Nugraha (2015) menggunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *lverage* dan *capital intensity*, sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013. Penelitian ini tidak meneliti kembali ukuran perusahaan, profitabilitas, *lverage* dan *capital intensity* dikarenakan telah banyak penelitian yang meneliti variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diungkap sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak? (2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak? (3) Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak? (4) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. (2) Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. (3) Untuk menguji pengaruh positif kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak. (4) Untuk menguji pengaruh positif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat dan merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat. Teori Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1996 dalam Meiranto dan Nugraha, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sosial sekitarnya dalam menjalankan usahanya agar tercipta hubungan yang baik antar keduanya. Menurut Deegan *et al.* (2002) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan dengan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Kesesuaian tersebut dapat dilakukan perusahaan melalui peningkatan tanggungjawab social (*social responsibility*) dan memperluas pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial (*social disclosure*) sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan operasi perusahaan.

Mekanisme *Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah mekanisme yang dalam praktiknya bertanggung jawab terhadap masyarakat secara sosial. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Menurut Dowling dan Preffer (dalam Purwanggono, 2015) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Lindblom (1994) dalam Oktaviana

(2014) menyarankan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan.

Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori *agency* adalah kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2014). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik saham akan mendorong manajer melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan manajer semata, seperti tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer.

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principle* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan *agent*. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut Frank *et al.* (2009) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Hadi dan Mangoting (2014) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang masih di dalam *grey area*.

Dalam penelitian ini menggunakan komponen pengukuran *effective tax rate* (ETR). Pengukuran agresivitas pajak menggunakan ETR seperti yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014), Boussaidi dan Hamed (2015) serta Atari (2016). ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR juga banyak digunakan dalam literatur, dan nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak.

Struktur Kepemilikan

Dalam dunia bisnis sekarang, pengelolaan perusahaan semakin dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien. Dalam

penelitian ini kepemilikan saham terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang terdiri dari direksi dan manajer. Semakin besar *insider ownership*, maka perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan (manajemen) semakin kecil, mereka akan bertindak dengan lebih hati-hati karena manajer juga ikut menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Bachtiar, 2015). Apabila *insider ownership* kecil berarti hanya sedikit jumlah pemegang saham yang ikut terlibat dalam mengelola perusahaan sehingga semakin tinggi pula kemungkinan munculnya masalah keagenan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan yang semakin besar. Dengan begitu kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingan pribadi agar tidak terjadi *tax aggressive*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah ataupun institusi swasta. Kepemilikan institusi menjalankan tugas untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer untuk dapat selalu fokus dalam menjalankan bisnis perusahaan dan menghindari manajer mementingkan diri sendiri (Amril *et al.*, 2015). Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Kepemilikan Publik

Pemegang saham minoritas, atau sering disebut sebagai pemegang saham publik dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat terhadap perusahaan dan saham yang dimiliki jumlahnya tidak signifikan, biasanya di bawah 5 persen (Puspita, 2014). Kepemilikan saham publik atau masyarakat juga merupakan pemilikan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan memiliki kekuatan minoritas. Menurut Prayogo (2015) kepemilikan saham publik ini tidak memperdulikan kebijakan strategis perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif serta kurang termotivasi mengontrol kinerja manajemen. Pemegang saham publik juga terbukti tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha (Puspita, 2014).

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Menurut Deegan *et al.* (2002) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi.

Apabila CSR diterima dan dipraktikkan secara etis dan berkelanjutan serta terinternalisasi dalam strategi dan nilai-nilai budaya perusahaan (*Corporate Culture*), dapat dipastikan perusahaan bisa meraih keuntungan yang langgeng (*sustainable profits*) baik keuntungan finansial maupun non finansial yang pada akhirnya berdampak positif bagi peningkatan nilai pasar perusahaan, nilai pemegang saham, dan nilai *stakeholders* secara

berkelanjutan. Pemenuhan CSR yang dilakukan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan bias, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi berbagai kecurangan yang dilakukan, salah satunya penghindaran pajak perusahaan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi di perusahaan, karena manajemen secara langsung merasakan manfaat atau dampak yang ditimbulkan atas konsekuensi dari suatu pengambilan keputusan, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang disebut *agency problem* dan dapat dikurangi dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial.

Penelitian yang dilakukan Novitasari (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Atari (2016) dan Rohmansyah (2017) yang menemukan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun Boussaidi dan Hamed (2015) dan Rahmawati (2016) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase *managerial ownership* yang tinggi akan mengurangi agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kepemilikan oleh pihak institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional bisa mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2016) dan Ginting (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kepatuhan dan kinerja perusahaan. Atiah *et al.* (2016) menghasilkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Novitasari (2017), Atari (2016) dan Amril *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan. Puspita (2014) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan publik dengan penghindaran pajak. Kemudian Santoso (2014) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Atiah *et al.* (2015) dan Prayogo (2015) menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan

meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan menaikkan laba perusahaan. Berdasarkan penelitian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit *maximum* tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*). Jesica dan Toly (2014) dan Badriah *et al.* (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Meiranto dan Nugraha (2015), Tjondro (2016) dan Purwanggono (2015) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lanis dan Richardson (2012), Rahmawati (2016), dan Mustika (2017) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Artinya, perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif, melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berjenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2011-2015, (2) Perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya, (3) Perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini dikarenakan akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif sehingga akan menyulitkan perhitungan, (4) Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan selama periode penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta melakukan studi pustaka yaitu telaah pustaka yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian melalui berbagai literature serta media yang mendukungnya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang

dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Proksi agresivitas pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rusydi dan Martani (2014) yaitu *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut Yoehana (2013) semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Berikut rumus *Effective Tax Rates* (ETR) tersebut yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh manajemen perusahaan yang terdiri dari direksi dan manajer. Pendekatan yang digunakan dalam mengukur kepemilikan manajerial dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmawati (2016) yaitu jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100%.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam mengukur kepemilikan institusional dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Amril *et al.* (2015) yaitu proporsi atau presentase jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional terhadap total jumlah lembar saham yang beredar.

Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan publik menggambarkan kekuatan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Penelitian ini mengikuti Puspita (2014) yang mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar. Data persentase kepemilikan publik diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *checklist* dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *checklist*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya pada *checklist*, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_i}{n}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2011:19). Analisis ini menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang jika suatu variabel memiliki nilai signifikan ($p > 0.05$) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis grafik yaitu : (a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, (b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dalam penelitian ini dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi dan jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2011:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW Test). Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Menurut Ghazali (2006:100) pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi melalui kriteria DW tabel dengan tingkat signifikan 5% yaitu sebagai berikut: (a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, (b) Angka D-W diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi, (c) Angka D-W di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2011:139) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan *scatterplot* yaitu: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression*). Persamaan regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$ETR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 KP + \beta_4 CSR + e$$

Keterangan:

ETR _{it}	: Effective Tax Rates (ETR) perusahaan i tahun ke-t
α_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
KM	: Kepemilikan Manajerial
KI	: Kepemilikan Institusional
KP	: Kepemilikan Publik
CSR	: Pengungkapan item CSR
e	: Error (Kesalahan Pengganggu)

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen (Gozhali, 2011:97). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit*)

Menurut Ghazali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan : (a) H₀ diterima dan H_a ditolak jika F_{hitung} < F_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, (b) H₀ ditolak dan H_a diterima jika F_{hitung} > F_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Gozhali, 2011:98). Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan : (a) H₀ diterima dan H_a ditolak jika t_{hitung} < t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ berarti ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, (b) H₀ ditolak dan H_a diterima jika t_{hitung} > t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	225	,1869	,3341	,2493	,0267
KM	225	,0000	,2561	,0383	,0311
KI	225	,0000	,9818	,3985	,3184
KP	225	,0025	,8454	,2592	,1717
CSR	225	,1154	,7436	,3584	,1536
Valid N (listwise)	225				

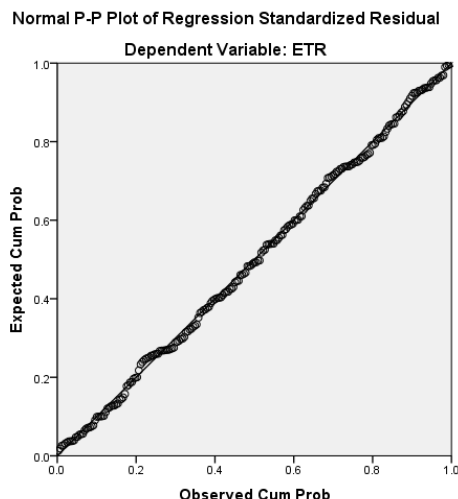
Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 225 data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015. Variabel *Effective Tax Rates* (ETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2493 dengan standar deviasi sebesar 0,0267. *Effective Tax Rates* (ETR) terendah (*minimum*) yaitu sebesar 0,1869 dan *Effective Tax Rates* (ETR) tertinggi (*maximum*) sebesar 0,3341. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0383 dengan standar deviasi sebesar 0,0311 dan kepemilikan manajerial terendah (*minimum*) sebesar 0,000 serta kepemilikan manajerial tertinggi (*maximum*) yaitu sebesar 0,2561. Variabel Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3985 dengan standar deviasi sebesar 0,3184 dan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,000 serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,9818. Variabel Kepemilikan Publik (KP) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2592 dengan standar deviasi sebesar 0,1717 dan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,0025 serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,8454. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3584 dengan standar deviasi sebesar 0,1536 dan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,1154 serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,7436.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di bawah dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Gambar 1
Grafik Normal P-P Plot

Dalam penelitian juga menguji normalitas data selain menggunakan grafik juga menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan hasil olah SPSS uji normalitas didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		225
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02324840
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.025
	Positive	.025
	Negative	-.025
Test Statistic		.025
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig, 2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Apabila nilai *tolerance* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai *tolerance* keempat variabel (KM, KI, KP, dan CSR) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KM	.901	1.110
	KI	.925	1.081
	KP	.882	1.134
	CSR	.946	1.057

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Uji Autokolerasi

Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat pada tabel *Durbin-Watson*, jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokolerasi. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui hasil uji autokolerasi yang menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,507. Hasil tersebut menunjukkan nilai *Durbin-Watson* berada diantara -2 sampai +2 yaitu $-2 < 1,507 < +2$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala autokolerasi atau dapat dikatakan bahwa uji autokolerasi terpenuhi.

Tabel 4
Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.496 ^a	.246	.233	.0234588	1.507

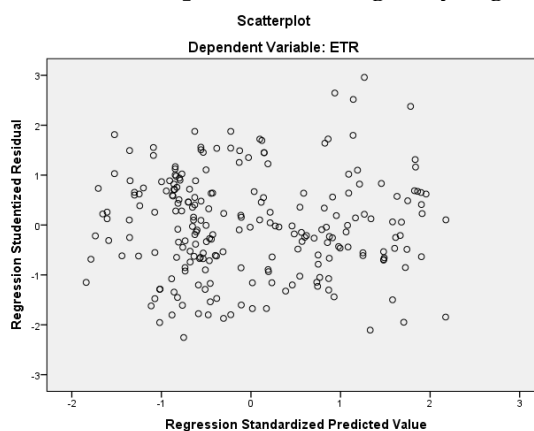
a. Predictors: (Constant), CSR, KP, KI, KM

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa sebaran pada titik-titik secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu *studentized residual* dan tidak membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Gambar 2
Grafik Uji Heteroskesidastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau hubungan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak secara linear.

Tabel 5
Hasil Uji regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.281	.006		5.033	.000
	KM	.086	.023	.228	3.693	.000
	KI	-.033	.005	-.396	-6.501	.003
	KP	-.049	.010	-.313	-5.022	.000
	CSR	-.026	.010	-.147	-2.449	.015

a. Dependent Variabel: ETR

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Dari tabel 5, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = 0,281 + 0,086KM - 0,033KI - 0,049KP - 0,026CSR + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.496 ^a	.246	.233	.0234588	1.507

a. Predictors: (Constant), CSR, KP, KI, KM

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil nilai koefisien determinasi *R-Square* (R^2) sebesar 0,246 atau 24,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 24,6% dan sisanya sebesar 75,4% (100% - 24,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui kelayakan model, apakah pemodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil *uji goodness of fit* disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Goodness of Fit
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.040	4	.010	17.976	.000 ^b
Residual	.121	220	.001		
Total	.161	224			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CSR, KP, KI, KM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,976 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan model regresi fit atau layak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak serta dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya. Hasil ini juga bisa mengindikasikan bahwa naik turunnya agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tergantung oleh naik turunnya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan CSR.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Gozhali, 2011). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan untuk menguji secara parsial variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik serta *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikansi. Hasil uji t adalah sebagai berikut: Hasil uji statistik t disajikan dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.281	.006		5.033	.000
KM	.086	.023	.228	3.693	.000
KI	-.033	.005	-.396	-6.501	.003
KP	-.049	.010	-.313	-5.022	.000
CSR	-.026	.010	-.147	-2.449	.015

a. Dependent Variabel: ETR

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ETR dengan nilai t sebesar 3,693 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan arah positif. Arah yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah agresivitas pajak, begitu pula sebaliknya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori *agency* adalah kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan prinsipal adalah pemilik saham yang memberikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada manajer perusahaan selaku agen. Penelitian ini menemukan hasil bahwa berdasarkan teori keagenan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency problem*, meningkatkan kepemilikan manajemen merupakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Bachtiar (2015) menyatakan manajer yang merasakan langsung dampak yang diambil dari keputusannya akan berupaya untuk meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menghindari pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016) dan Rohmansyah (2017) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula agresivitas pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) dan Rahmawati (2016) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase *managerial ownership* yang tinggi akan mengurangi agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ETR dengan nilai t sebesar -6,501 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan arah negatif. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi agresivitas pajak, begitu pula sebaliknya.

Keberadaan pemegang saham institusional di suatu perusahaan meningkatkan kepatuhan dan kinerja manajemen. Namun, penelitian ini menemukan hasil bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang berarti dengan adanya kepemilikan institusional bukan berarti dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja manajemen. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional memiliki keinginan untuk mensejahterakan diri sendiri tanpa memikirkan rusaknya citra perusahaan. Menurut Atari (2016) pemegang saham institusional jangka pendek mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menjadi lebih agresif dalam melakukan upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, adanya kepemilikan institusional belum tentu akan berdampak pada peningkatan proses pengawasan yang berpengaruh terhadap berkurangnya tindakan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba termasuk salah satunya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori keagenan yang memberikan gambaran bahwa masalah penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan pengawasan melalui *good corporate governance* yang salah satunya adalah melalui kepemilikan saham oleh investor institusi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017), Atari (2016) dan Amril *et al.* (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016), dan Rahmawati (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Atiah *et al.* (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ETR dengan nilai t sebesar -5,022 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan arah negatif yang berarti semakin tinggi kepemilikan publik semakin tinggi agresivitas pajak, begitu sebaliknya.

Pemegang saham publik dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat. Kepemilikan saham publik atau masyarakat merupakan pemilikan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan serta memiliki kekuatan minoritas. Hal ini yang menyebabkan kepemilikan saham publik tidak mementingkan kebijakan strategis perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif serta kurang termotivasi mengontrol kinerja manajemen. Selain itu, kepemilikan publik juga berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Kondisi inilah dimanfaatkan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi mengejar kepentingan pribadi dan juga merupakan tuntutan dari investor publik. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menaikkan penghasilan karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan menaikkan penghasilan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiah *et al.* (2015) dan Prayogo (2015) yang menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan saham publik menunjukkan hubungan positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Santoso (2014) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Puspita (2014) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan publik dengan penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap ETR dengan nilai t sebesar -2,449 dan tingkat signifikansi sebesar 0,015 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka semakin tinggi agresivitas pajak, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*). Dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa besarnya pendapatan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan diantaranya: sumbangan, program beasiswa, program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dan lain-lain, dimana biaya-biaya tersebut termasuk di dalam biaya CSR. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan melakukan kegiatan CSR bertujuan untuk memperoleh *image* positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang *socially irresponsible* seperti tindakan agresivitas pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Rahmawati (2016), dan Mustika (2017) sama-sama menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR perusahaan tinggi, maka semakin tinggi agresivitas pajak. Namun

pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiranto dan Nugraha (2015), Tjondro (2016) dan Purwanggono (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka semakin rendah agresivitas pajak. Penelitian ini juga berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Jesica dan Toly (2014) dan Badriah *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan sehingga memperoleh sampel yang lebih besar dan dapat menggambarkan hasil yang sesuai, (2) Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel independen dalam model penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian terkait faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara lebih mendalam, (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat laporan CSR bukan hanya melalui laporan tahunan melainkan *sustainable report* yang dilaporkan tersendiri oleh perusahaan, (4) Penelitian selanjutnya disarankan agar tidak hanya menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak tetapi juga menggunakan proksi lain seperti, *Book Tax Differences* (BTD) sebagai pembanding agar agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, A., D. F. Puspa, dan P. Fauziati. 2015. Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Journal of Financial Economics* 7(1).
- Atari, J. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Journal of Manajemen Faculty of Economy* 3(1): 1137-1149.
- Atiah, U., Ethika, dan A. F. Minovia. 2016. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Leverage, Struktur Kepemilikan Dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal of Financial Economics* 9(1).
- Bachtiar, M. D. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badriah, N., Maslichah, dan M. C. Mawardi. 2016. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 6: 42-51.
- Boussaidi, A. dan M. S. Hamed. 2015. The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisia Context. *Journal of Asian Business Strategy* 5(1): 1-12.

- Deegan, C., M. Rankin, dan J. Tobin. 2002. An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory. *Journal of Accounting, Auditing and Accountability* 15(3): 312-343.
- Frank, M. M., L. J. Lynch, dan S. O. Rego. 2009. Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies?. *The Accounting Review*. 84(2): 467-496.
- Ginting, S. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 6(2): 165-176.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, J. dan Y. Mangoting. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review* 4(2): 1-10.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Jessica, dan A. A. Toly. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review* 4(1).
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal* 26(1): 75-100.
- Meiranto, W. dan N. B. Nugraha. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Journal Of Accounting* 4(4): 1-14.
- Mustika. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014). *Journal of Manajemen Faculty of Economy* 4(1): 1886-1900.
- Novitasari, S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Journal of Manajemen Faculty of Economy* 4(1): 1901-1914.
- Oktaviana, N. E. 2014. Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prayogo, K. H. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei pada Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Purwanggono, E. A. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Mayoritas terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Puspita, S. R. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Accounting* 3(2): 1-13.
- Rahmawati, A. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal perpajakan* 10(1): 1-9.
- Rohmansyah, B. 2014. Determinan Kinerja Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Journal Competitive* 1(1): 22-37.
- Rusidy M. K., dan D. Martani. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*. 24-27 September.

- Santoso, T. B. 2014. Pengaruh Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Journal of Accounting* 3(4): 1-11.
- Tjondro, E. 2016. Pengaruh Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18(2): 105-118.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- _____. Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.